

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Pemilih Golput karena Faktor Teknis

Faktor teknis menyangkut hal-hal non-politis yang memengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya yang menyangkut kendala akibat keterbatasan akses informasi, pengetahuan dan kendala administrasi. Faktor teknis masyarakat tidak menggunakan hak pilih atau Golput pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, yaitu:

3.1.1 Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak terhadap pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020. Banyak warga merasa cemas untuk datang ke TPS karena risiko penularan virus Covid-19, walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti penggunaan hand sanitizer, jaga jarak, disediakan sarung tangan dan TPS serta bilik suara yang disemprot desinfektan secara berkala, namun kekhawatiran ini masih tetap menjadi kendala bagi sebagian orang untuk datang ke TPS. Masa Pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa alasan mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya diantaranya seperti yang dikemukakan oleh informan 1:

“Sebenarnya saya ingin menggunakan hak suara saya, namun rasa khawatir terhadap penyebaran virus Covid-19 cukup besar. Meskipun saya tahu pihak KPU sudah menyiapkan protokol kesehatan, seperti penyemprotan desinfektan dan penggunaan sarung tangan, tetap saja saya merasa waswas. Saya tinggal bersama orang tua yang sudah lanjut usia, jadi saya harus ekstra hati-hati. Lebih baik saya tidak datang ke TPS daripada mengambil risiko membawa *virus* ke rumah.”

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan 4 yang memutuskan untuk tidak ke TPS:

“Saya menghargai upaya KPU dalam menerapkan protokol kesehatan selama pemilihan, tetapi kekhawatiran terhadap penularan Covid-19 tetap menghantui. Di lingkungan saya, masih banyak yang merasa belum aman berada di kerumunan, sekalipun untuk waktu yang singkat. Apalagi dengan munculnya beberapa kasus baru di sekitar waktu pemilihan, membuat saya semakin ragu. Jadi saya memutuskan untuk tidak hadir ke TPS.”

Selain itu informan 6 juga menambahkan pendapatnya bahwa tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan pandemi covid-19:

“Protokol kesehatan sebenarnya penting, tapi dalam praktiknya terasa sangat merepotkan. Saat simulasi pemilihan sebelumnya, saya melihat warga harus antri lama karena pembatasan jumlah orang di dalam TPS. Ditambah lagi dengan prosedur mencuci tangan sebelum dan sesudah masuk, membuat proses semakin lama. Kondisi ini membuat saya berpikir ulang untuk datang. Akhirnya, saya memutuskan tidak memilih.”

Sesendapat dengan hal diatas, informan 8 menyatakan tetap di rumah dan tidak ke TPS karena adanya protokol kesehatan covid-19:

“Saya sudah membaca informasi bahwa protokol kesehatan di TPS sangat ketat, tapi justru itu yang membuat saya enggan. Harus mencuci tangan berkali-kali, antri lama, dan menjaga jarak membuat saya merasa tidak nyaman. Apalagi waktu itu cuaca panas dan saya punya keluhan pernapasan, jadi memakai masker dalam waktu lama sangat menyiksa. Situasi itu membuat saya berpikir ulang, apakah sepadan untuk keluar rumah hanya demi mencoblos. Akhirnya saya putuskan untuk tidak ikut memilih.”

Sejalan dengan hal tersebut, informan 23 juga menyatakan untuk tetap tinggal di rumah karena adanya pembatasan pemerintah:

“Pada saat itu, situasi masih sangat dibatasi karena adanya PPKM. Kami di lingkungan tempat tinggal sudah terbiasa untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Meskipun mencoblos itu

penting, saya merasa datang ke TPS bukanlah prioritas saat itu karena adanya larangan mobilitas. Saya sendiri bekerja dari rumah dan membatasi interaksi sosial, jadi tidak nyaman jika harus ke tempat umum. Saya lebih memilih untuk tidak memilih daripada harus melanggar protokol yang dianjurkan pemerintah.”

Berdasarkan ketiga petikan wawancara yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa keputusan sebagian warga untuk tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan manifestasi dari proses pengambilan keputusan politik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan lingkungan sosial. Dalam perspektif teori perilaku politik, tindakan politik individu tidak hanya ditentukan oleh struktur institusional semata, tetapi juga oleh persepsi subjektif terhadap risiko, stimulus sosial, dan pengalaman pribadi yang membentuk sikap politik.

Beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap potensi penularan Covid-19, meskipun otoritas penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini mencerminkan bahwa persepsi terhadap keamanan lingkungan menjadi variabel penting yang memengaruhi perilaku politik, khususnya dalam bentuk partisipasi elektoral. Keputusan untuk tidak datang ke TPS, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai bentuk abstain yang tidak sepenuhnya lahir dari sikap apatis, melainkan dari pertimbangan rasional terhadap risiko kesehatan yang dirasakan.

Selanjutnya, keputusan politik yang diambil warga juga menunjukkan adanya dinamika kognitif, di mana mereka mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan politik mereka terhadap lingkungan sosial terdekat, seperti keluarga yang rentan atau lansia di rumah. Proses ini sejalan dengan pendekatan psikologis dalam teori perilaku politik, yang menekankan bahwa emosi, ketakutan, dan kecemasan turut membentuk pilihan politik individu. Dalam hal ini, ketakutan terhadap Covid-19 menjadi variabel psikologis yang dominan dalam menentukan perilaku memilih.

Terdapat ketidakpercayaan terhadap kepatuhan masyarakat lain terhadap protokol kesehatan menambah dimensi sosial dari perilaku politik yang muncul. Artinya, preferensi individu dalam berpartisipasi dipengaruhi pula oleh asumsi terhadap perilaku kolektif di ruang publik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perilaku politik tidak bersifat otonom, tetapi saling terkait dengan persepsi tentang orang lain dalam sistem sosial yang sama.

Dengan demikian, golput dalam konteks ini bukan semata-mata bentuk golput karena ketidakpedulian politik, tetapi merupakan ekspresi dari perilaku politik rasional yang dipengaruhi oleh faktor eksternal (pandemi), pertimbangan moral (melindungi keluarga), serta persepsi terhadap efektivitas protokol kesehatan yang diterapkan oleh negara. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas perilaku politik masyarakat

urban dalam situasi krisis kesehatan, di mana keputusan politik bersifat responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi dan psikologis individu.

3.1.2 Permasalahan Administratif

Kendala administratif merujuk pada permasalahan Daftar Pemilih, terjadinya kekeliruan dan ketidakakuratan seperti belum terdaftar sebagai pemilih baik di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) serta sudah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menerima surat pemberitahuan memilih (Model C-6 KWK). Permasalahan administratif ini yang mengakibatkan sejumlah warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS seperti yang dikemukakan oleh informan 10 sebagai berikut:

“Saat hari pemilihan, saya datang ke TPS sesuai undangan sebelumnya, tetapi ternyata nama saya tidak ada dalam DPT maupun DPTb. Petugas TPS juga tidak bisa memberikan solusi yang jelas selain menyarankan untuk melapor ke kelurahan. Karena waktu yang terbatas dan tidak ada kejelasan, saya pun tidak bisa menyalurkan hak pilih saya. Saya merasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi. Padahal saya selalu ikut pemilu sebelumnya.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan 15 yang memutuskan untuk tidak ke TPS setelah mengalami kendala administrasi, yakni namanya tidak ditemukan dalam daftar pemilih.

“Saya merasa sudah mengikuti prosedur pendataan pemilih jauh hari sebelumnya. Namun, ketika datang ke TPS, nama saya tidak tercantum di daftar manapun. Petugas hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa memilih karena tidak terdaftar. Saya merasa dirugikan karena tidak bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi yang seharusnya terbuka untuk semua warga. Masalah ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam sistem administrasi pemilu.”

Sebagaimana dijelaskan oleh informan 22 memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pemilihan karena mendapati namanya tidak tercatat di DPT maupun DPTb.

“Saya tidak menerima surat undangan untuk memilih, padahal saya sudah terdaftar dalam DPT pada pemilu sebelumnya. Akibatnya, saya tidak tahu lokasi TPS tempat saya seharusnya memberikan suara. Saya sempat bertanya ke tetangga, tapi mereka juga tidak tahu pasti. Karena tidak ada kepastian informasi, saya akhirnya tidak datang ke TPS. Situasi ini membuat saya merasa tidak diberi akses yang layak sebagai pemilih.”

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan 24 yang memutuskan untuk tidak hadir di TPS karena tidak menerima Surat Pemberitahuan Memilih (Model C6-KWK) menjelang hari pemungutan suara:

“Saya memang sudah niat untuk memilih, tetapi sampai hari H saya tidak menerima surat Model C6 dari petugas. Tanpa surat itu, saya bingung dimana TPS saya berada, karena sebelumnya lokasi TPS sering berubah-ubah. Saya merasa kecewa karena informasi penting seperti ini seharusnya diberikan tepat waktu. Tidak adanya surat undangan membuat saya tidak bisa ikut mencoblos. Saya pikir ini adalah bentuk kurangnya kesiapan dalam proses pendataan dan distribusi informasi.”

Fenomena tidak tercantumnya nama sejumlah warga dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, yang berdampak pada ketidakmampuan warga menggunakan hak pilihnya, mencerminkan adanya hambatan struktural yang turut memengaruhi perilaku politik masyarakat. Berdasarkan perspektif teori perilaku politik, tindakan politik individu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, nilai, dan preferensi pribadi, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang membentuk peluang dan keterbatasan dalam partisipasi politik.

Surat Pemberitahuan Memilih (Model C6-KWK) yang tidak diterima oleh sejumlah pemilih pada Pilwali Kota Denpasar 2020 menjadi faktor yang memengaruhi keputusan warga untuk tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam perspektif teori perilaku politik, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik, khususnya dalam bentuk kehadiran pada hari pemilihan, tidak hanya ditentukan oleh sikap dan motivasi individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh variabel struktural dan administratif yang membentuk pengalaman politik warga secara langsung.

Surat Model C6-KWK memiliki peran penting sebagai instrumen informasi yang menunjukkan lokasi dan waktu pencoblosan. Absennya surat tersebut berakibat pada kebingungan pemilih terkait di mana mereka seharusnya menyalurkan hak pilihnya. Dari sudut pandang behaviorisme politik, keputusan untuk tidak hadir di TPS dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk non-partisipasi pasif yang tidak disebabkan oleh apatisme politik, melainkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi yang bersifat teknis dan administratif.

Dalam konteks ini, hambatan administratif berupa absennya nama dalam daftar pemilih menjadi faktor teknis yang secara langsung membatasi keterlibatan warga dalam proses elektoral. Beberapa informan menyatakan telah memenuhi syarat administratif sebagai pemilih, bahkan melakukan verifikasi data secara mandiri. Namun, karena keterbatasan sistem pendataan, mereka tidak dapat memberikan suara. Situasi ini menunjukkan bahwa perilaku politik tidak selalu merupakan hasil dari sikap pasif atau apatis, melainkan dapat dipengaruhi oleh

kegagalan institusional dalam menyediakan akses yang adil terhadap partisipasi politik.

Menurut pendekatan perilaku politik yang bersifat strukturalis, ketimpangan dalam akses terhadap sistem elektoral, termasuk pendataan pemilih yang tidak akurat, dapat menciptakan alienasi politik, yaitu perasaan keterasingan individu terhadap proses politik karena ketidakterlibatan yang tidak mereka kehendaki. Dalam hal ini, keputusan untuk tidak hadir atau tidak memberikan suara bukan semata-mata pilihan bebas, melainkan bentuk dari ketidakmampuan untuk berpartisipasi akibat kendala sistemik.

Lebih lanjut, respons warga yang menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat memilih tanpa melakukan protes atau tindak lanjut tertentu juga mencerminkan adanya penyesuaian sikap politik terhadap kondisi struktural yang dianggap tidak bisa diubah secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku politik warga tidak hanya rasional dalam arti kalkulatif, tetapi juga bersifat adaptif terhadap struktur sosial dan birokrasi yang dihadapi.

Dengan demikian, hasil wawancara menggambarkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh kualitas layanan administrasi pemilu, dan bahwa hambatan teknis seperti tidak tercantumnya nama dalam daftar pemilih dapat menghasilkan golput pasif yang bukan merupakan bentuk ketidakpedulian, melainkan konsekuensi dari keterbatasan sistem. Temuan ini memperkuat posisi teori perilaku politik yang menekankan pentingnya dimensi struktural dan institusional dalam memfasilitasi atau menghambat keterlibatan warga negara dalam demokrasi elektoral.

3.1.3 Kesibukan Pekerjaan

Faktor teknis terakhir penyebab pemilih tidak memilih ke TPS yaitu keterbatasan waktu karena bekerja. Meskipun saat hari pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020 ditetapkan sebagai hari libur nasional, banyak warga urban di Denpasar seperti pekerja di sektor pariwisata, transportasi, pengusaha dan pedagang yang tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga tidak sempat meluangkan waktu untuk datang ke TPS. Selain itu dikarenakan rentang waktu pencoblosan yang hanya sampai pukul 13.00 Wita dirasa kurang bagi sebagian warga yang memiliki jadwal padat di pagi-siang hari seperti yang disampaikan oleh informan 3 berikut:

“Sebagai pekerja di sektor transportasi, saya tetap harus bekerja meskipun hari pemilihan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Saya bekerja dengan sistem shift pagi hingga siang, dan karena waktu pencoblosan hanya sampai pukul 13.00 Wita, saya tidak sempat ke TPS. Tidak mungkin saya meninggalkan pekerjaan karena itu berdampak pada pendapatan harian saya. Sebenarnya saya ingin berpartisipasi, tapi kondisi kerja tidak memungkinkan. Jadi saya terpaksa melewatkan pemilu tahun itu.”

Informan 5 pun mengemukakan bahwa waktu pencoblosan yang terbatas tidak sesuai dengan ritme kerja harian yang dijalannya, sehingga ia tidak sempat hadir di TPS.

“Saya bekerja di restoran yang tetap beroperasi penuh saat hari libur, termasuk pada hari pemilihan. Situasinya cukup padat, dan saya tidak mendapat izin untuk keluar sebentar ke TPS. Jam kerja saya mulai pagi, sehingga tidak memungkinkan untuk mencoblos dalam rentang waktu yang ditentukan. Saya merasa waktu pencoblosan terlalu sempit bagi kami yang tidak punya fleksibilitas waktu. Karena itu, saya tidak ikut memilih pada Pilwali tersebut.”

Senada dengan hal tersebut, Informan 17 juga menyatakan bahwa keputusannya untuk tidak ke TPS dipengaruhi oleh jam kerja yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan aktivitas usaha.

“Saya adalah pelaku usaha kecil yang tidak bisa menutup toko hanya untuk ke TPS. Penghasilan saya tergantung pada pelanggan yang datang setiap hari. Apalagi waktu pencoblosan hanya sampai jam satu siang, sementara pagi hari adalah jam sibuk untuk berdagang. Kalau saya pergi mencoblos, saya kehilangan potensi pendapatan hari itu. Jadi saya lebih memilih tetap di tempat usaha dan melewatkan pemilu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian warga tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) akibat keterbatasan waktu karena pekerjaan, mencerminkan dimensi penting dalam kajian perilaku politik, yaitu hubungan antara struktur sosial-ekonomi dan partisipasi politik. Dalam perspektif teori perilaku politik, keputusan individu untuk tidak menggunakan hak pilihnya dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara kondisi objektif (seperti pekerjaan dan kebutuhan ekonomi) dengan persepsi dan prioritas individu dalam menentukan tindakan politik.

Meskipun hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional, sebagian besar informan yang bekerja di sektor informal, pariwisata, transportasi, maupun perdagangan, tetap harus menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa status sebagai warga negara dengan hak politik tidak selalu sejalan dengan kapasitas aktual untuk menggunakan hak tersebut. Dalam kerangka behaviorisme politik, partisipasi politik bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk tekanan ekonomi dan struktur kerja yang kaku.

Berdasarkan sudut pandang teori ini, keputusan untuk tidak hadir di TPS bukan mencerminkan sikap apatis atau tidak peduli terhadap proses demokrasi, melainkan hasil dari pertimbangan rasional berbasis kebutuhan ekonomi sehari-hari. Para informan menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan stabilitas pendapatan daripada keterlibatan elektoral, terutama ketika waktu pencoblosan yang tersedia dianggap tidak cukup fleksibel bagi mereka yang bekerja sejak pagi hingga sore hari. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk perilaku politik pragmatis, di mana warga membuat keputusan politik berdasarkan keterbatasan praktis dan kondisi hidup yang riil.

Lebih jauh, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana struktur sosial memengaruhi akses terhadap ruang partisipasi politik. Bagi kelompok pekerja informal atau mandiri, tidak adanya dukungan kelembagaan seperti cuti memilih, fleksibilitas waktu, atau fasilitas pencoblosan alternatif, menjadi hambatan yang membatasi mereka dalam menunaikan hak pilih. Dengan demikian, perilaku golput dalam konteks ini bukan semata ekspresi individual, tetapi juga merupakan hasil dari disparitas struktural dalam penyelenggaraan pemilu yang belum sepenuhnya inklusif terhadap dinamika kerja masyarakat urban.

Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa partisipasi politik tidak berdiri di ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan teknis yang dihadapi oleh individu. Teori perilaku politik memungkinkan kita untuk melihat bahwa keterlibatan atau ketidakterlibatan politik bukan hanya soal kesadaran atau kemauan, tetapi juga tentang kemampuan riil dan ruang partisipasi yang tersedia secara adil bagi seluruh warga negara.

3.2. Pemilih Golput karena Faktor Politis

Faktor politis penyebab pemilih memutuskan untuk Golput pada Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020 merupakan bentuk sikap ideologis atau kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih, Dalam dimensi ini Golput muncul karena kesadaran hak politiknya, tetapi memutuskan untuk tidak menggunakannya sebagai bentuk ekspresi politik terhadap sistem, aktor maupun proses pemilu yang dianggap tidak merepresentasikan harapan mereka. Faktor politis masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, yaitu:

3.2.1 Ketidakpercayaan terhadap Sistem Politik (*Political Distrust*)

Sebagian pemilih yang memutuskan tidak ke TPS disebabkan karena mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem politik yang ada. Mereka tidak yakin bahwa melalui pemilihan ini menghasilkan perubahan substantif dalam kehidupan mereka apalagi bagi penduduk urban yang notabene tidak penduduk asli, sehingga rasa memilikinya jauh lebih rendah dibandingkan penduduk asli Denpasar. Anggapan bahwa siapapun yang terpilih sebagai Pemimpin “*tidak akan berbeda*” atau “*sama-sama tidak membawa manfaat nyata*” melandasi keputusan untuk golput, seperti yang disampaikan oleh informan 2 berikut:

“Saya memutuskan untuk tidak memilih karena merasa tidak ada calon yang benar-benar mewakili aspirasi saya sebagai warga pendatang. Dari pengalaman sebelumnya, siapapun yang terpilih tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan saya. Program-program yang dijanjikan terasa jauh dari kebutuhan kami sebagai warga urban. Saya merasa pemilu ini lebih bersifat seremonial daripada substansial. Maka dari itu, saya tidak merasaz perlu untuk datang ke TPS.”

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan 7 yang memutuskan untuk tidak hadir di TPS karena merasa tidak ada kandidat yang mampu membawa perubahan nyata:

“Saya sudah lama tinggal di Denpasar, tapi tetap merasa seperti orang luar karena tidak banyak yang berubah walau pemimpin silih berganti. Ketika pemilu datang, saya tidak tertarik untuk memilih karena merasa tidak ada yang benar-benar memperjuangkan masyarakat seperti saya. Apalagi kami hanya dilihat sebagai angka dalam daftar pemilih, bukan bagian dari kebijakan. Jadi saya memilih untuk tidak ikut serta. Buat apa memilih kalau hasilnya tetap sama?”

Sebagaimana dijelaskan oleh informan 9, ketidakhadirannya di TPS didasari oleh rasa kecewa terhadap proses politik yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat urban seperti dirinya:

“Pemilu bagi saya hanyalah rutinitas lima tahunan yang tidak membawa perubahan berarti. Saya merasa siapa pun yang menang, orientasinya tidak akan jauh berbeda: hanya sibuk dengan janji-janji semata. Sebagai warga urban, saya sering merasa terpinggirkan dalam perumusan kebijakan. Rasa percaya saya terhadap proses politik sudah menurun sejak beberapa pemilu terakhir. Maka dari itu, saya memilih untuk golput.”

Hal tersebut turut diungkapkan oleh informan 13 yang menilai bahwa pemilu tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupannya, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi:

“Saya tidak menggunakan hak pilih karena merasa tidak memiliki ikatan emosional atau kepentingan langsung dalam politik lokal Denpasar. Saya adalah perantau yang hanya numpang hidup di sini, dan tidak merasa didengar atau diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan saya terhadap sistem politik semakin berkurang. Saya tidak yakin satu suara saya akan mengubah apa pun. Karena itu, saya tidak datang ke TPS.”

Informan 21 juga menyampaikan bahwa keputusan untuk golput merupakan refleksi dari krisis kepercayaan terhadap sistem politik yang menurutnya hanya menguntungkan kelompok tertentu:

“Dari dulu saya selalu skeptis terhadap hasil pemilu, karena bagi saya, semua kandidat hanya pandai berbicara tapi minim aksi nyata. Saya melihat tidak ada perbedaan berarti dari pemimpin satu ke pemimpin lainnya. Terlebih lagi, sebagai warga non-penduduk asli, saya merasa tidak memiliki cukup ruang dalam dinamika politik lokal. Hal itu membuat saya tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Golput menjadi bentuk sikap saya atas kekecewaan tersebut.”

Senada dengan itu, informan 14 mengemukakan bahwa rendahnya rasa memiliki terhadap proses politik lokal membuatnya enggan hadir ke TPS.

“Saya merasa tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap sistem yang ada, karena hasil pemilu tidak pernah berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup saya. Semua terasa stagnan, tidak peduli siapa yang menjabat. Apalagi saya sebagai warga pendatang sering merasa tidak menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah. Rasa kepemilikan saya terhadap proses politik di sini juga sangat rendah. Karena itu, saya memutuskan untuk tidak ke TPS.”

Hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian warga memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak percaya terhadap sistem politik yang ada, memperlihatkan manifestasi dari perilaku politik yang dipengaruhi oleh dimensi psikologis dan sosiologis. Dalam kerangka teori perilaku politik, keputusan untuk golput bukan hanya sekadar tindakan individual, tetapi mencerminkan reaksi terhadap kondisi politik dan struktur sosial yang melingkupinya.

Informan menyatakan bahwa ketidakpercayaan mereka terhadap proses pemilihan bersumber dari keyakinan bahwa siapa pun yang terpilih tidak akan

membawa perubahan berarti dalam kehidupan mereka. Pandangan ini memperlihatkan adanya alienasi politik, yaitu suatu kondisi ketika individu merasa terpisah atau tidak terhubung dengan sistem politik. Menurut David Easton dan pendekatan behavioralis lainnya, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga politik merupakan indikator melemahnya legitimasi sistem. Akibatnya, warga cenderung menarik diri dari keterlibatan aktif, termasuk dalam bentuk partisipasi elektoral.

Lebih lanjut, informan yang berasal dari kelompok urban non-penduduk asli menunjukkan rendahnya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap wilayah tempat tinggal dan sistem politik lokal. Hal ini sejalan dengan pendekatan sosiologis dalam studi perilaku politik, yang menekankan bahwa identitas sosial dan keterikatan komunitas memengaruhi tingkat partisipasi politik. Ketika seseorang tidak merasa menjadi bagian dari sistem sosial-politik di suatu daerah, maka motivasinya untuk terlibat dalam proses politik menurun. Dalam kasus ini, pemilih merasa menjadi "orang luar" yang tidak diperhitungkan dalam kebijakan pemerintah daerah, sehingga mereka merasa suaranya tidak memiliki signifikansi.

Pandangan bahwa "siapa pun yang terpilih tidak akan berbeda" mencerminkan skeptisisme politik, yaitu keyakinan bahwa tidak ada aktor politik yang mampu mewujudkan perubahan yang nyata. Sikap ini menjadi bentuk respon rasional terhadap pengalaman politik masa lalu yang dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan. Maka, tindakan golput bukanlah semata-mata ketidakpedulian, melainkan bentuk ekspresi politik pasif sebagai konsekuensi dari pengalaman kolektif atas sistem yang dinilai tidak responsif.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan persepsi psikologis terhadap sistem politik, serta pengalaman historis mereka dalam menghadapi praktik pemerintahan. Golput dalam konteks ini mencerminkan perilaku politik yang bersifat defensif dan pasif, di mana warga memilih untuk tidak berpartisipasi karena tidak melihat adanya peluang nyata untuk perubahan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa membangun kepercayaan politik memerlukan sistem yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan substantif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

3.2.2 Kurangnya Kompetisi yang Menarik

Dominasi satu partai atau koalisi cenderung menyebabkan kompetisi politik menjadi kurang menarik. Pada pelaksanaan Pilwali Kota Denpasar Tahun 2020 dengan 2 (dua) pasangan calon, paslon nomor urut 1 Jaya-Wibawa diusung Partai besar PDI Perjuangan dan juga memiliki keuntungan lainnya Jaya Negara pernah menjadi Wakil Walikota Denpasar periode sebelumnya, sehingga seringkali menciptakan persepsi dikalangan masyarakat bahwa pasangan calon urut 2 dirasa sulit untuk mengimbangi dan hasilnya pasti sudah bisa ditebak, hal ini tentu dapat mengurangi motivasi untuk datang ke TPS, sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan 12 yang menyatakan bahwa dominasi partai besar membuat hasil pemilihan terasa sudah ditentukan sejak awal:

“Saya merasa sejak awal hasil Pilwali Denpasar 2020 sudah bisa ditebak. Dengan dukungan dari partai besar dan posisi petahana, calon nomor urut 1 jelas lebih unggul. Situasi ini membuat pemilu terkesan formalitas saja, bukan ajang kompetisi yang sesungguhnya. Saya jadi tidak termotivasi untuk datang ke TPS karena merasa suara saya tidak

akan mengubah hasil akhir. Pilihan rasional saya adalah tidak berpartisipasi.”

Sebagaimana dijelaskan oleh informan 16, ia merasa pemilu kurang menarik karena ketimpangan kekuatan politik antara pasangan calon:

“Kalau hanya ada dua pasangan calon dan salah satunya didukung oleh partai dominan seperti PDI Perjuangan, hasilnya sudah bisa diprediksi. Bagi saya, suasana pemilu menjadi tidak menarik karena terlihat tidak seimbang sejak awal. Saya merasa seperti hanya menonton pertunjukan yang skenarionya sudah ditentukan. Hal ini menurunkan semangat saya untuk memilih. Jadi saya memutuskan untuk tidak ke TPS.”

Hal tersebut turut diungkapkan oleh informan 18 yang memutuskan untuk tidak datang ke TPS karena menilai proses pemilihan tidak menghadirkan kompetisi yang seimbang:

“Melihat latar belakang calon nomor urut 1 yang sebelumnya sudah menjabat dan punya jaringan kuat, saya merasa calon lainnya hanya sebagai pelengkap. Tidak ada pertarungan ide atau visi yang terasa seimbang. Ini membuat saya merasa pemilu tidak benar-benar memberikan pilihan. Saya memilih untuk tidak memilih karena merasa tidak ada kompetisi yang layak untuk diikuti. Demokrasi jadi tampak statis, bukan dinamis.”

Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilwali Denpasar Tahun 2020, sebagaimana tercermin dalam hasil wawancara, menunjukkan adanya kecenderungan golput yang tidak disebabkan oleh ketidakpedulian, melainkan oleh persepsi bahwa hasil pemilihan telah dapat diprediksi sejak awal. Dalam konteks ini, dominasi partai besar dan figur calon petahana menimbulkan anggapan bahwa proses pemilihan bersifat simbolik dan kurang memberikan ruang bagi perubahan nyata. Hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori perilaku politik, khususnya dalam kerangka psikologi pemilih dan persepsi politik.

Menurut pendekatan behavioralis, perilaku politik individu tidak semata-mata dipengaruhi oleh struktur formal sistem politik, tetapi juga sangat ditentukan oleh persepsi terhadap kompetisi dan efektivitas suara mereka. Informan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa keunggulan pasangan calon dari partai dominan, seperti PDI Perjuangan, serta status petahana dari salah satu calon, menyebabkan kompetisi menjadi timpang. Ketika pemilih merasa bahwa hasil pemilihan sudah dapat dipastikan sejak awal, maka efikasi politik internal mereka menurun, yakni keyakinan bahwa partisipasi mereka berdampak pada hasil politik menjadi lemah.

Fenomena ini juga berhubungan dengan konsep rational choice theory, yang menjelaskan bahwa individu bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi terhadap suatu tindakan. Dalam hal ini, memilih dianggap sebagai aktivitas yang tidak memberikan keuntungan signifikan karena hasilnya dinilai sudah pasti. Pemilih yang bersikap rasional cenderung menarik diri dari proses pemilihan jika mereka menilai bahwa tidak ada persaingan yang setara atau pilihan alternatif yang realistis. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak datang ke TPS sebagai bentuk respons terhadap dominasi politik yang dianggap tidak memberikan ruang demokrasi yang sehat.

Lebih jauh, perilaku tidak memilih ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk apatisisme selektif, di mana individu tetap memiliki kesadaran politik, namun memilih untuk tidak menggunakan hak pilih sebagai ekspresi kekecewaan atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem politik. Dalam konteks Pilwali Denpasar, persepsi bahwa kandidat dari koalisi besar tetap menang tanpa

perlawanan yang berarti menurunkan motivasi publik untuk berpartisipasi secara aktif. Ini menunjukkan bahwa dinamika kompetisi politik sangat menentukan keterlibatan elektoral masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan teori perilaku politik, keputusan untuk golput dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpedulian politik secara umum, melainkan sebagai respons terhadap struktur kompetisi yang tidak setara dan dominasi kekuatan politik tertentu. Untuk mendorong partisipasi yang lebih tinggi, sistem pemilu harus mampu menciptakan kontestasi yang terbuka, kompetitif, dan memberikan pilihan yang relevan serta berimbang bagi pemilih.

3.2.3 Kurangnya Sosialisasi yang Efektif

Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, pasangan calon, dan stakeholder terkait menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemilih memutuskan untuk golput. Fenomena ini tidak hanya tentang ketidakpedulian pemilih, tetapi juga kegagalan dalam menyampaikan informasi dan membangun motivasi. Situasi pandemi COVID-19 menjadi hambatan tersendiri bagi para penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar karena tidak dapat menjangkau segmen pemilih secara keseluruhan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media tetapi masih ada celah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau dalam menyampaikan esensi pentingnya partisipasi politik dalam pemilu/pemilihan, seperti yang disampaikan oleh informan 11 berikut:

“Saya tidak datang ke TPS karena merasa informasi terkait pemilu sangat minim. Saya bahkan tidak tahu siapa pasangan calon yang maju dan apa visi-misi mereka. Sosialisasi yang dilakukan menurut saya kurang menjangkau masyarakat biasa seperti saya, apalagi selama pandemi interaksi langsung sangat terbatas. Saya tidak aktif di media sosial, jadi tidak tahu kalau ternyata ada informasi online. Karena tidak merasa terlibat sejak awal, saya memilih untuk tidak ikut memilih.”

Sebagaimana disampaikan oleh informan 19, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu membuatnya tidak memahami pentingnya partisipasi dalam pemilihan:

“Selama masa kampanye, saya jarang sekali melihat atau mendengar kegiatan sosialisasi dari pihak penyelenggara pemilu. Informasi yang saya dapat hanya sebatas baliho dan selebaran, itu pun tidak menjelaskan secara jelas kenapa kita harus memilih. Situasi pandemi mungkin menjadi hambatan, tapi seharusnya bisa dicari cara agar informasi tetap sampai ke masyarakat. Saya merasa kurang diberdayakan sebagai pemilih. Karena itu, saya tidak terlalu peduli dan akhirnya tidak datang ke TPS.”

Hal tersebut turut diungkapkan oleh informan 20 yang mengaku tidak memperoleh akses informasi yang cukup selama masa pandemi, sehingga memutuskan untuk tidak memilih:

“Menurut saya, sosialisasi dari pihak KPU dan calon pemimpin masih sangat kurang, terutama untuk masyarakat pinggiran. Saya tinggal di wilayah padat penduduk dan tidak pernah ada kegiatan yang mengajak kami berdialog soal pentingnya memilih. Saat pandemi, mungkin mereka kesulitan, tapi kami juga kesulitan memahami prosesnya tanpa bimbingan. Tidak heran kalau banyak orang seperti saya tidak memilih. Ini bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak tahu dan tidak diajak.”

Informan 25 pun menuturkan bahwa sosialisasi yang tidak menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang tidak aktif di media digital, membuatnya merasa terpinggirkan dari proses pemilu:

“Selama pandemi, saya paham bahwa kegiatan dibatasi, tapi itu bukan alasan untuk tidak maksimal dalam sosialisasi. Saya tidak tahu apa perbedaan dari masing-masing pasangan calon karena tidak pernah dijelaskan secara langsung. Media massa juga tidak terlalu gencar menginformasikan. Pemilu terasa seperti kegiatan elitis yang tidak menyentuh warga seperti saya. Karena tidak merasa bagian dari proses, saya tidak ke TPS.”

Senada dengan itu, informan 26 menyatakan bahwa absennya pendekatan langsung dan kurangnya penyampaian informasi menjadi alasan utama dirinya tidak ke TPS.

“Saya merasa bahwa pelaksanaan pemilu kali ini kurang terasa gaungnya. Sebelumnya, biasanya ada kegiatan kampanye terbuka atau sosialisasi dari petugas, tetapi kini semua seolah berjalan diam-diam. Saya tidak merasa dilibatkan secara emosional maupun informasi. Dalam kondisi seperti itu, keinginan untuk datang ke TPS menjadi sangat kecil. Saya golput bukan karena apatis, tapi karena tidak diberi alasan yang cukup kuat untuk memilih.”

Fenomena rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilwali Kota Denpasar Tahun 2020 yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu maupun pasangan calon mencerminkan keterkaitan erat antara akses informasi politik dan keputusan individu untuk berpartisipasi. Berdasarkan teori perilaku politik, khususnya pendekatan psikologis dan komunikasi politik, partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh informasi politik tersedia, dapat dipahami, dan diterima oleh pemilih secara efektif.

Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sebagian besar ketidakhadiran mereka di TPS bukan dilatarbelakangi oleh ketidakpedulian terhadap politik, melainkan oleh keterbatasan akses informasi mengenai tahapan pemilihan, profil calon, maupun pentingnya hak suara mereka. Dalam hal ini,

kurangnya intensitas dan kualitas sosialisasi diperburuk oleh kondisi pandemi COVID-19 menciptakan kesenjangan informasi yang mengakibatkan penurunan motivasi untuk berpartisipasi.

Menurut pendekatan psikologis dalam perilaku politik, partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, dan pemahaman individu terhadap sistem politik. Jika individu merasa tidak mendapatkan cukup informasi atau merasa tidak dilibatkan secara emosional dan rasional, maka efikasi politik internal mereka melemah. Kondisi ini tercermin dalam keputusan informan untuk golput karena tidak memiliki cukup dasar informasi untuk membuat keputusan yang dianggap bermakna.

Lebih lanjut, dalam perspektif komunikasi politik, keberhasilan proses sosialisasi pemilu sangat ditentukan oleh sejauh mana pesan-pesan politik mampu menjangkau seluruh segmen masyarakat. Informan mengindikasikan bahwa meskipun media daring telah digunakan, pendekatan ini tidak sepenuhnya efektif menjangkau kelompok yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang tidak inklusif menciptakan kelompok yang secara fungsional terpinggirkan dari proses demokrasi.

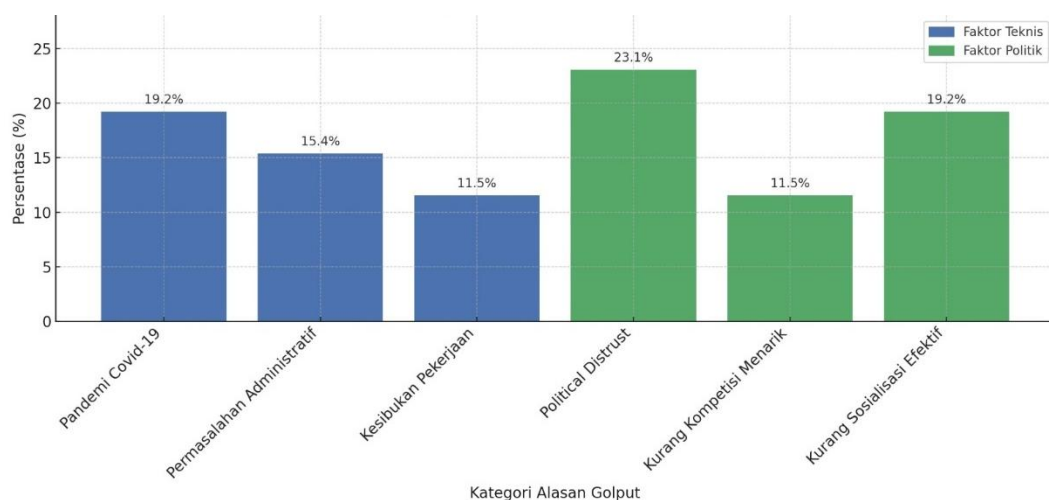
Sementara itu, pendekatan sosiologis dalam teori perilaku politik juga menggarisbawahi pentingnya lingkungan sosial dan jaringan informasi dalam memengaruhi partisipasi pemilih. Dalam konteks ini, tidak adanya dialog publik secara langsung, minimnya kegiatan tatap muka, serta tidak hadirnya fasilitator politik di lingkungan pemilih menyebabkan masyarakat tidak merasa sebagai

bagian dari proses politik lokal. Akibatnya, keputusan untuk tidak memilih muncul sebagai bentuk ketidakberdayaan struktural, bukan semata-mata sikap apatis.

Dengan demikian, keputusan untuk golput sebagaimana yang tergambar dari hasil wawancara bukanlah bentuk pasif dari ketidakpedulian politik, melainkan respon rasional terhadap lemahnya intervensi komunikasi politik yang seharusnya membangun kesadaran dan partisipasi warga. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih adaptif, personal, dan terstruktur dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilu, terutama dalam kondisi krisis seperti pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas alasan masyarakat kota Denpasar tidak menggunakan hak pilihnya sangat beragam mulai dari karena faktor teknis dan faktor politis, Jika digambarkan dalam grafik maka diketahui sebagai berikut:

Gambar 3.1
Persentase Alasan Golput Pilwali Denpasar 2020



Grafik diatas disusun berdasarkan data dari 26 informan menunjukkan distribusi alasan warga tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020. Alasan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: faktor teknis dan faktor politis.

1. Faktor Teknis (46,2%)

Sebanyak 12 dari 26 informan menyatakan bahwa keputusan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara dipengaruhi oleh kendala teknis. Di antara alasan teknis tersebut, yang paling dominan adalah kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 (19,2%), yang menjadi hambatan utama dalam konteks pandemi. Beberapa informan menilai bahwa kehadiran di TPS berisiko bagi kesehatan pribadi maupun keluarga mereka. Selain itu, sebanyak 15,4% dari informan mengaku terkendala secara administratif, seperti tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tidak menerima surat undangan memilih (Model C6-KWK). Sementara itu, 11,5% lainnya menyebutkan kesibukan pekerjaan sebagai penyebab ketidakhadiran mereka pada hari pemungutan suara. Hal ini memperlihatkan bahwa selain hambatan sistemik, kondisi sosial ekonomi juga turut berperan dalam mendorong tingkat golput.

2. Faktor Politis (53,8%)

Golput karena pertimbangan politik menjadi alasan yang paling dominan dalam grafik ini, dengan total 14 informan. Sub-kategori terbanyak adalah ketidakpercayaan terhadap sistem politik (23,1%). Informan yang termasuk dalam kelompok ini menyatakan keraguannya terhadap integritas proses politik, serta ketidakpercayaan bahwa hasil pemilu membawa perubahan yang berarti.

Alasan lain yang muncul adalah minimnya daya tarik dalam kompetisi politik (11,5%), di mana pemilih merasa bahwa kandidat yang tersedia tidak mewakili aspirasi mereka secara substansial. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang efektif juga menjadi faktor signifikan (19,2%), karena sebagian informan merasa tidak mendapat informasi yang cukup terkait calon, waktu, atau prosedur pemilihan.

3. Interpretasi Keseluruhan

Berdasarkan distribusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku golput pada Pilwali Kota Denpasar 2020 tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk apatisme semata. Sebaliknya, grafik memperlihatkan adanya interaksi antara hambatan struktural, situasional, dan persepsi politik individu. Dalam banyak kasus, keputusan untuk tidak memilih bukan karena keengganan berpartisipasi, melainkan karena keterbatasan akses, informasi, atau kepercayaan terhadap sistem.

3.3. Budaya Politik Masyarakat Urban Kota Denpasar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020

Berdasarkan rangkaian hasil wawancara dengan sejumlah informan yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, dapat diidentifikasi bahwa masyarakat urban Kota Denpasar menganut budaya politik campuran. Budaya ini mencerminkan keberadaan dua pola orientasi politik yang berbeda dan bahkan kontradiktif, yaitu budaya politik parokial dan budaya politik partisipan, yang muncul secara bersamaan dalam lingkungan masyarakat yang heterogen dan dinamis seperti Kota Denpasar, pada satu sisi tampak jelas adanya karakteristik budaya politik parokial dalam sikap sejumlah warga yang menunjukkan

keterasingan atau ketidakterlibatan terhadap proses politik formal. Hal ini terwujud dalam bentuk apatisme politik, yang ditandai dengan ketidakpedulian terhadap pemilu dan keputusan untuk tidak datang ke TPS. Warga yang termasuk dalam kategori ini umumnya merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa pengaruh terhadap hasil pemilihan, atau menilai bahwa seluruh kandidat tidak memberikan alternatif yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. Ketiadaan keterlibatan emosional, informasi yang tidak memadai, serta rendahnya kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu dan para kandidat mencerminkan keterputusan mereka dari sistem politik formal.

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya unsur budaya politik partisipan, yaitu ditandai oleh kesadaran hak dan tanggung jawab politik, meskipun tidak selalu terejawantahkan dalam tindakan langsung. Sejumlah informan mengekspresikan keinginan untuk berpartisipasi namun terhambat oleh faktor teknis, administratif, dan situasional seperti ketidakterdaftarannya dalam DPT, tidak menerima surat undangan memilih, atau kesulitan mengakses TPS karena alasan pekerjaan dan waktu, di samping itu muncul pula bentuk-bentuk kekecewaan terhadap minimnya pilihan kompetitif, yang menunjukkan bahwa sebagian warga memiliki ekspektasi terhadap demokrasi yang substantif dan bukan sekadar formalitas prosedural.

Kehadiran kedua unsur budaya politik tersebut secara simultan memperlihatkan bahwa masyarakat Kota Denpasar berada dalam fase peralihan budaya politik, yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti latar belakang pendidikan, status ekonomi, akses informasi, serta konteks pandemi COVID-19

yang mempersempit ruang interaksi sosial-politik. Dalam konteks ini, budaya politik tidak dapat dipahami sebagai satu bentuk yang utuh dan stabil, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus berubah dan berproses mengikuti dinamika ruang dan waktu.

Masyarakat urban Kota Denpasar, dengan keragaman asal-usul, pekerjaan, dan tingkat mobilitas tinggi, menunjukkan bahwa orientasi politik mereka tidak sepenuhnya terkonsolidasi ke arah partisipasi aktif, namun juga tidak seluruhnya pasif. Sebagian warga menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu kebijakan dan kesadaran atas pentingnya pemilu, sementara sebagian lainnya bersikap sinis atau skeptis terhadap integritas sistem politik. Keadaan ini menempatkan budaya politik masyarakat dalam posisi ambivalen, yakni antara harapan dan keraguan, antara potensi partisipatif dan realitas keterbatasan struktural.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya politik masyarakat Kota Denpasar dalam Pilwali 2020 merupakan refleksi dari budaya politik campuran, di mana terdapat irisan antara disengagement dan engagement dalam ranah politik. Pemahaman terhadap realitas ini penting sebagai dasar perumusan strategi kebijakan dan sosialisasi politik yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.